

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perkembangan globalisasi dan semakin ketatnya persaingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat adalah salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi, serta kualitas hidup yang layak. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara.(Sultan dkk., 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan oleh Perserkatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara serta mengklasfikasikan negara ke dalam kategori maju atau berkembang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan, termasuk dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta pendidikan. Oleh karena itu, agar meningkatkan indeks pembangunan manusia dibutuhkan peran/intervensi dari pemerintah.

Menurut beberapa penelitian internasional, *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator pembangunan manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.(Leon-Castro dkk., 2021)

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan berperan sebagai pondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.(Saputra dkk., 2026) Namun permasalahan akses pendidikan juga masih di jumpai di Kabupaten Tabalong, terutama pada wilayah pedesaan yang relatif terpencil. Masih di jumpai keterbatasan akses akibat kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan menuju sekolah yang rusak atau sulit di lalui.

Selain pada aspek pendidikan, aspek kesehatan juga penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabalong, khususnya pada pelayanan di Rumah Sakit Daerah. Muncul keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit belum optimal, bahkan sempat menjadi perbincangan di media sosial, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya sejalan dengan anggaran yang di alokasikan.

Kabupaten Tabalong terletak di provinsi Kalimantan. Selatan dengan ibu kota di Kecamatan Tanjung. Secara geografis, Tabalong berada di bagian utara Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah di barat dan utara, serta Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur di timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 3.553–3.946 km² dan terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa.

Tabalong memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, minyak bumi, perkebunan karet, kelapa sawit, serta komoditas buah-buahan. Hal ini juga menjadi andalan perekonomian daerah ini. Posisi geografisnya yang strategis di jalur lintas Kalimantan Tengah, Timur, dan Selatan menjadikan Tabalong sebagai gerbang utama dan penyangga Ibukota Nusantara (IKN) yang berjarak sekitar 217 km dari Tabalong. Dari tahun ke tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2015	69.35
2016	70.07
2017	70.76
2018	71.14
2019	71.78
2020	72.19
2021	72.6
2022	73.13
2023	73.85
2024	74.41

Sumber: Badan Pusat Statistik Tabalong 2025

Bisa di lihat pada tabel 1.1 IPM Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun indeksnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2015 masih berada di angka 69,35 tapi pada akhir 2024 IPM naik hingga mencapai angka 74.41. Peningkatan pada indeks pembangunan manusia ini tidak lepas dari peran

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengadaan barang publik, pembangunan sektor-sektor produktif dan lain lain.

Pengeluaran pemerintah ialah salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk melakukan intervensi terhadap perekonomian dan dinilai memiliki peran yang paling efektif. Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi barang dan jasa oleh pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan. Kapasitas keuangan dapat tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Hamdani dkk., 2023)

Berdasarkan Undang Undangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2004, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun, dibahas, serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD memuat secara rinci seluruh penerimaan daerah serta seluruh pengeluaran daerah dalam satu periode anggaran. (Undang Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah, 2004). Sebelum diberlakukan penganggaran pada tahun 2003, pengeluaran daerah dalam APBD terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Klasifikasi belanja pemerintah yaitu: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Di Kabupaten Tabalong, belanja pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBD) memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan

infrastruktur, sektor pertanian dan pelayanan publik. Menurut BPK RI Tahun 2024 APBD kabupaten Tabalong mencapai Rp 3 triliun sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang besar untuk menjalankan program pembanguana, seperti pengembangan 10 kampung hortikoltura dan meningkatkan jalan usaha tani, jalan desa, serta jembatan. Sehingga mepermudah distribusi hasil kebun seperti cabai, terong, dann sayuran ke pasar, yang menyuplai hingga 1,5-2,5 ton perhari ke wilayah Ibu Kota Nusantara.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Karena untuk pembelian aset tetap maka belanja modal memili peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sehingga berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Timang dkk., 2022).

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran belanja modal secara optimal dan tepat dan tepat sasaran. Belanja modal yang memadai merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya belum secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena belanja tersebut masih berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Namun demikian, dalam jangka menengah dan panjang, belanja modal dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan kualitas hidup yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kegiatan ekonomi, pembangunan sekolah dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, serta pembangunan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan angka harapan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak

Selain belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tingkat gini ratio juga turut memengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. Gini ratio tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan mereka yang berpendapatan rendah, bahkan sebagian berada di bawah garis kemiskinan. Ketika gini ratio terjadi, akses masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tidak merata. (Rad, 2025) Akibatnya, daerah yang mengalami ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat IPM yang lebih rendah dibandingkan daerah yang distribusi pendapatannya lebih merata.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ialah gini ratio. Gini ratio merupakan kondisi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan di masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan adanya kesenjangan

ekonomi yang cukup besar di antara berbagai kelompok masyarakat. (Aisyah & Sishadiyati, 2024). Gini ratio terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (Sondakh, 2023).

Belanja pemerintah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Belanja pemerintah merupakan bagian dari fungsi alokasi yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, belanja tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam belanja pemerintah adalah belanja modal, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, gedung, dan fasilitas publik yang memberikan manfaat jangka panjang.

Teori ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki peran krusial dalam redistribusi sumber daya dan penyediaan layanan publik. Menurut teori ini, belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyediakan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan. Selain itu, teori fiskal menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan di masyarakat.

Tabel 1. 2
Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Ratio Gini Kab. Tabalong

Tahun	Belanja Modal	Dana Alokasi Khusus	Ratio Gini
2020	211.529.503.424.00	60. 549. 078.870.00	0.35
2021	254.822.134.515.00	70.914.290.813.00	0.29
2022	316.945.108.640.00	42.086 658.120.00	0.34
2023	681.688.566.520.00	467.307.055.590.00	0.28
2024	853.150.824.196.00	487.037.200.230.00	0.30

Sumber: Badan Pusat Statistik & BPKAD Kab. Tabalong 2025

Pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwa belanja pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya belanja modal mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pada data Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami perkembangan yang beragam dari tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan daerah terhadap kebijakan fiskal pusat, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun demikian, pada data perkembangan Ratio Gini dari tahun 2019-2024 menunjukkan gini ratio yang masih masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan belanja pemerintah belum secara optimal berdampak pada penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Selain dari belanja modal dan DAK, tingkat ketimpangan juga turut berpengaruh terhadap tingkat IMP pada suatu wilayah. Gini ratio tersebut menunjukkan adanya senjangan pendapatan di dalam masyarakat, di mana

terdapat kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, sementara pada sisi lain masih terdapat kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Terjadinya ketimpangan di suatu wilayah menandakan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan (layanan public) tidak merata. Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa daerah yang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi akan memiliki tingkat IPM yang rendah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia ialah gini ratio. Gini ratio dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat karena keterbatasan pendapatan yang dimiliki menyebabkan terbatasnya pilihan masyarakat dalam menentukan standar hidup, serta mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Distribusi pendapatan umumnya diukur menggunakan indeks Gini Ratio. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, maka distribusi pendapatan menunjukkan tingkat pemerataan yang semakin baik. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam wilayah tersebut semakin tinggi.

Distribusi pendapatan ini seringkali diukur menggunakan indeks gini ratio. Kita dapat melihat seberapa baik distribusi pendapatan suatu wilayah

dengan melihat angka gini ratio (0 sampai dengan 1). Semakin nilai gini ratio mendekati nol, itu menandakan bahwa distribusi pendapatan makin merata dan begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis atau menguji bagaimana pengaruh belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta gini ratio terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan itu penelitian ini berjudul "Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tabalong" bertujuan untuk menganalisis sejauh mana belanja pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara belanja modal, dana alokasi khusus dan gini ratio terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong tahun 2015-2024
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara belanja modal, dana alokasi khusus dan gini ratio terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong tahun 2015-2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh secara parsial antara belanja modal, dana alokasi khusus dan gini ratio terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong tahun 2015-2024
2. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh gini ratio simultan antara belanja modal, dana alokasi khusus dan ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong tahun 2015-2024.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, signifikansi terdiri atas signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis dan signifikansi praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi publik dan pembangunan daerah, khususnya terkait dengan pengaruh belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi rujukan teoritis dalam memahami keterkaitan antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dan pencapaian kesejahteraan sosial.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan sebagai bentuk penghindaran salahnya pengertian maupun perbedaan pemahaman antara peneliti dan pembaca, terutama terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2015–2024”.

1. Belanja Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan seluruh pengeluaran negara/daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam perspektif ekonomi publik, belanja pemerintah merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Maulina, 2021). Dalam penelitian ini, belanja pemerintah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang diprosikan melalui belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tingkat ketimpangan (gini ratio) di Kabupaten Tabalong tahun 2015–2024.
2. Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti pembangunan jalan, gedung, irigasi, dan fasilitas publik lainnya (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Dalam penelitian ini, belanja modal dapat di artikan sebagai realisasi

pengeluaran pemerintah Kabupaten Tabalong yang digunakan untuk pembangunan dan penyediaan sarana prasarana publik guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Khusus diartikan sebagai dana transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya pada bidang pelayanan publik dan infrastruktur.
4. Ketimpangan (Gini Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai gini ratio berada pada rentang 0 sampai 1, yang mana semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata dan semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam penelitian ini, gini ratio diartikan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Tabalong yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Kesejahteraan Masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang tercermin melalui kualitas hidup yang layak. (Badan Pusat Statistik,

2022) Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak di Kabupaten Tabalong tahun 2015–2024.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang telah dilakukan penulis mengenai penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, berikut diantaranya:

Nasriadi pada tahun 2022, yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki korelasi negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa pengeluaran ini tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, DAK menunjukkan pengaruh positif meskipun tidak signifikan, yang berarti bahwa realisasi DAK tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia, meski efeknya terbatas. Gini ratio, yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan, juga memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan manusia.

Imam Agus Sutono pada tahun 2022, dengan judul Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau, dengan nilai p sebesar 0,9584. Sebaliknya, belanja pemerintah

pusat (Pempus) memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai p 0,0000. Secara simultan, kedua jenis belanja tersebut berpengaruh signifikan pada IPM, terbukti dari nilai p uji F yang juga 0,0000. Model regresi menunjukkan bahwa 54,45% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh belanja Pemda dan Pempus, menandakan bahwa peningkatan IPM lebih dipengaruhi oleh alokasi belanja pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah.

Novi Qistina Salma pada tahun 2023, dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2017-2021, dengan nilai koefisien 2,524593 dan probabilitas 0,0000. Sebaliknya, pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai koefisien 1,265846 dan probabilitas 0,2978. Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dengan nilai koefisien -0,854252 dan probabilitas 0,0000. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM, dan nilai Adjusted R-squared sebesar 68,06% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka dari itu penulis membagi penulisan skripsi ini dalam 5 bab (Sukarni dkk., 2024), yaitu bab I pendahuluan,

bab II pembahasan, bab III metode penelitian, bab IV hasil dan pembahasan, dan bab V penutup.

Pada bab I pendahuluan dipaparkan latar belakang masalah, pada bagian ini dikemukakan alasan-alasan pentingnya dilakukan penelitian tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2025. Permasalahan yang dibahas kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah, agar penelitian ini fokus, memperoleh hasil penelitian yang jelas dan berguna secara akademik, maka dikemukakan tujuan dan signifikansi penelitian. Selanjutnya dipaparkan sistematika penulisan ditulis untuk memberikan alur penelitian yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.

BAB II Landasan Teori, berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh para ahli dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Teori tersebut meliputi teori belanja pemerintah, belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), ketimpangan (gini ratio), kesejahteraan masyarakat, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, pada bab ini juga memuat hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, serta landasan pemikiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data, berisi gambaran umum Kabupaten Tabalong, penyajian data penelitian, hasil pengolahan data, hasil

pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.